

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE IN LANDSLIDE DISASTER MITIGATION IN
BOJONEGORO REGENCY**

Sindi Puspita¹, Junadi², Septi Wulandari³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Bojonegoro

Email Korespondensi: junadisulis06@gmail.com

Abstrak

Jumlah kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Bojonegoro cukup tinggi, untuk meminimalisir jumlah angka resiko bencana yang terjadi maka diperlukan peran *stakeholders* dalam mengurangi resiko bencana tanah longsor melalui kolaborasi. Melihat selama ini dalam mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses kolaborasi yang dibangun dalam mengurangi resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bojonegoro. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan enam subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan dengan optimal dan belum sepenuhnya efektif, meskipun beberapa indikator telah terpenuhi, seperti komitmen dari beberapa individu, membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat sudah saling berbagi informasi. Hal ini karena masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi sehingga menghambat keberhasilan kolaborasi, yaitu dialog tatap muka yang belum berjalan dengan intens, kurang aktifnya peran berbagai aktor dalam kolaborasi, sumber daya yang kurang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada BPBD Kabupaten Bojonegoro sebagai koordinator penanggulangan bencana untuk melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan peran swasta, akademisi, media massa, masyarakat untuk memperkuat komitmen, dan meningkatkan koordinasi antar *stakeholders*.

Kata kunci: *Collaborative Governance, Stakeholders, Tanah Longsor*

Abstract

The number of landslide disasters in Bojonegoro Regency is quite high, to minimize the number of disaster risks that occur, the role of stakeholders is needed in reducing the risk of landslides through collaboration. Seeing so far in landslide disaster mitigation carried out by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) has not been effective. This study aims to know and describe how the collaboration process is built in reducing the risk of landslides in Bojonegoro Regency. The research methodology uses qualitative descriptive research methods with six research subjects. The results showed that collaborative governance in landslide disaster mitigation in Bojonegoro Regency has not run optimally and has not been fully effective, although several indicators have been met, such as commitments from several individuals, building trust between parties involved in sharing information. This is because there are still several indicators

that have not been met that hinder the success of collaboration, namely face-to-face dialogue that has not run intensely, less active role of various actors in collaboration, inadequate resources. Based on the results of the study, researchers provided advice to BPBD Bojonegoro Regency as a disaster management coordinator to conduct monitoring and evaluation, increase the role of the private sector, academics, mass media, the community to strengthen commitment, and improve coordination between stakeholders.

Keywords: Collaborative Governance, Stakeholders, Tanah Longsor

1. Pendahuluan

Bencana merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari begitu saja oleh manusia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Indonesia merupakan sebuah negara yang rawan terjadinya bencana dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik. Bencana dibagi ke dalam dua bagian yaitu bencana alam dan bencana non alam. Hampir seluruh provinsi di Indonesia pernah terjadi bencana alam seperti angin puting beliung, bencana banjir dan tanah longsor ketiga bencana tersebut merupakan bencana paling sering melanda Indonesia di beberapa wilayah.

Jawa timur adalah Provinsi yang dikelilingi oleh gunung berapi aktif serta

lautan dan intensitas curah hujan tinggi menjadikan wilayah ini rawan terjadinya bencana. Tanah longsor menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi ketika musim penghujan tiba. Salah satunya pada Kabupaten Bojonegoro yang merupakan wilayah kabupaten rawan bencana tanah longsor. Letak kabupaten Bojonegoro berada pada tanah yang mudah gerak dan banyak di aliri sungai bengawan solo yang melalui 15 kecamatan. Berdasarkan media berita online Kabupaten Bojonegoro menyatakan wilayah Kabupaten yang rawan terjadinya tanah longsor yakni Kecamatan Temayang, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sekar, Kecamatan Bubulan, dan Dander.

Dari data jatim.antaranews.com (Diakses 26 November 2022, pukul 18:30) pada hari Kamis 6 Oktober 2011 Kabupaten Bojonegoro dalam sepuluh bulan terakhir terjadi 20 kali tanah longsor yang mengakibatkan puluhan rumah warga terpaksa harus dipindahkan dengan total kerugian Rp.500 juta lebih, kejadian tanah longsor terburuk ini terjadi di Desa Ndrokilo, Kecamatan Kedungadem. Selanjutnya, Kecamatan temayang merupakan salah satu

kecamatan yang berada di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki intensitas kejadian tanah longsor yang tergolong tinggi, dikarenakan Kecamatan Temayang memiliki area hutan dan tebing yang sangat luas diikuti banyaknya rekahan tanah.

Keresahan yang sedang dirasakan sebagian besar masyarakat Kabupaten Bojonegoro salah satunya kecamatan temayang ini tentu menjadi masalah publik yang harus dapat segera ditangani oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dengan salah satu cara yaitu melakukan upaya-upaya untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Untuk memenuhi kelancaran serta berbagai kebutuhan diperlukan kerjasama atau kolaborasi antar *stakeholder* dalam bencana tanah longsor di Kabupaten Bojonegoro.

Collaborative governance merupakan sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri (Sink Dalam Machruf.I.N, 2020). Melihat persoalan bencana tanah longsor di Kabupaten Bojonegoro dalam prespektif *collaborative governance* dapat menjadi salah satu bentuk solusi cara efektif dan efisien bagi pemerintah dalam menangani masalah ini, dapat dilakukan kerjasama

kolaboratif oleh pemerintah, sektor swasta, masyarakat, serta aktor-aktor kebencanaan guna melakukan upaya mengurangi resiko dan dampak dari bencana alam tanah longsor yang akan terjadi sewaktu-waktu.

2. Kajian Pustaka

a. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penyusunan proposal yang berjudul *Collaborative Governance* Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut : Penelitian yang dilakukan oleh Ichwan Nurudin, (Vol 2 No 1 Tahun 2020) melakukan penelitian yang berjudul “Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan Dalam Prespektif *Collaborative Governance*“. Penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan upaya penanggulangan pra bencana alam tsunami sebelum dan sesudah kejadian tsunami tahun 2018, dan mengidentifikasi upaya-upaya penanggulangan pra bencana alam tsunami tersebut ke dalam presepektif konsep *Collaborative Governance*. Selanjutnya berfokuskan pada penelitian yang mendeskripsikan apa saja upaya penanggulangan pra bencana yang sudah dilakukan sebelum dan sesudah kejadian tsunami pada tahun 2018 serta mengidentifikasi upaya penanggulangan

pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan ke dalam konsep Collaborative Governance.

Aziz Masyhuri (Vol 4 No 2 2021), melakukan penelitian dengan judul “Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Semarang”. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi antar stakeholders dalam manajemen bencana tanah longsor di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Berfokus pada pendiskripsian bagaimana proses kerjasama antar stakeholders dalam manajemen bencana tanah longsor yang meliputi proses kolaborasi, kondisi awal, desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa kolaborasi antar *stakeholders* dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang telah melalui berbagai tahap kolaborasi mulai dari kondisi awal hingga memperoleh hasil sementara dari proses kolaborasi. Hasil dari proses kolaborasi dalam manajemen bencana tanah longsor yang dilakukan oleh berbagai stakeholders tersebut belum berjalan dengan optimal

b. Landasan Teori

Kata “*Collaborative*” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Colabour*” yang artinya bekerja sama. Kolaborasi merupakan istilah

umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan oleh satu pihak bahkan lebih untuk mencapai tujuan bersama, dalam melakukan sebuah kolaborasi tersebut diperlukan campur tangan dari beberapa pihak mulai dari tingkat individu, sampai pada tingkat organisasi guna memecahkan suatu masalah secara bersama. Maka pengertian kolaborasi adalah penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Istilah kolaborasi kerap digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan (Holzer et al Dalam Arrozaq. D, 2016).

Konsep “*Governance*” berasal dari istilah *government* yang merupakan istilah yang digunakan pada lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara, pada hal ini penyelenggaraan pemerintahan ditekankan pada pemerintah sebagai pengatur dan pelaksana tugas pemerintahan. Oleh sebab itu munculah konsep *governance* yang menggantikan konsep *government* (Ansell, 2008). Namun demikian, pengertian tersebut bukanlah merupakan pengertian tunggal dari sebuah konsep kolaborasi. Masih banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan berbagai para ahli dengan sudut pandang yang beragam. Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan *governance* atau

pemerintahan yaitu konsep *colaborative governance*. (Yulianto, 2018).

3. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu tipe penelitian yang melakukan penggambaran tentang situasi atau kejadian, hal ini didasarkan karena penelitian ini menghasilkan data-data berupa informasi dari informan apa adanya dan sesuai dengan penelitian. Sugiyono (Sugiyono, 2017.) Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan masalah adalah *Collaborative Governance* Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bojonegoro, yang dimana fokus penelitian ini memfokuskan 5 indikator menurut Ansell dan Gash yaitu : *face to face dialog, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcome*.

4. Hasil Dan Pembahasan

Sejarah dan Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

Pada masa kehidupan sejarah di Indonesia kuno dimulai dengan pengaruh yang kuat dari kebudayaan Hindu yang datang dari India sejak abad 1 yang pada saat itu membedakan kehidupan negara Indonesia

pada jaman Madya dan jaman yang baru. Pada kala itu kabupaten Bojonegoro masuk kedalam wilayah kekuasaan Majapahit, hingga abad XVI saat kerajaan Majapahit runtuh, kekuasaan berpindah ke Demak Jawa Tengah, dan Bojonegoro menjadi bagian wilayah dari kerajaan Demak. Sehingga sejarah Bojonegoro yang kuno bercorak Hindu dengan berdasarkan temuan-temuan fakta dengan banyak benda peninggalan sejarah pada jaman kuno di wilayah hukum sehingga kabupaten Bojonegoro mulai terbentuk.

Bojonegoro pada saat menjadi wilayah Demak mempunyai loyalitas tinggi kepada raja dan pada kerajaan. Hingga kemudian dengan berkembangnya budaya yang baru yaitu Islam, pengaruh budaya Hindu terdesak dan pada akhirnya terjadilah pergeseran nilai dan tata masyarakat dari nilai Hindu berubah ke nilai yang baru Islam. Raden Patah, Senopati Jumbun, Adipati Bintaro, diresmikan sebagai Raja I awal abad XVI dan semenjak itu Bojonegoro menjadi wilayah kedaulatan Demak. Dalam peralihan kekuasaan yang disertai pergolakan membawa Bojonegoro masuk dalam wilayah kerajaan Pajang dengan raja Raden Jaka Tingkir Adipati Pajang pada tahun 1568.

Kabupaten Bojonegoro lebih dikenal sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia karena Kabupaten

Bojonegoro memiliki potensi migas di wilayah Kabupaten Bojonegoro cukup besar. Kabupaten Bojonegoro secara geografis dialiri oleh aliran Sungai Bengawan Solo yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa yang juga menjadi batas natural antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Sungai Bengawan Solo mengalir beberapa Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, mulai dari ujung barat yaitu di Kecamatan Padangan, yang kemudian mengalir menuju kearah timur yang berakhir di Kecamatan Baureno. Aspek geografis lainnya Kabupaten Bojonegoro didomisili oleh pegunungan kapur, di sebelah Utara dan Selatan Kabupaten Bojonegoro yang merupakan rangkaian dari pegunungan Kendeng, Gunung Pandan, Kramat, Dan Gajah. Kabupaten Bojonegoro beriklim tropis terdiri atas dua musim yaitu musim kemarau (April-Oktober) dan musim hujan (November-Maret). Dengan keadaan geografis tersebut maka komoditas di Kabupaten Bojonegoro diantaranya merupakan kegiatan pertanian, pada saat cuaca penghujan ditanami padi dan pada cuaca kemarau kegiatan pertanian cenderung menghasilkan panen tembakau, hasil kehutanan, pertambangan, dan potensi cadangan minyak gas bumi yang merupakan 20% nasional di Kabupaten Bojonegoro.

Bencana Yang Sering Terjadi di Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro memiliki sembilan isu bencana, antara lain banjir bengawan solo, banjir bandang, banjir genangan kota, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, kekeringan, kebakaran kegagalan industry dan bencana lainlain (Tersambar Petir, Tersengat Listrik dan Tenggelam). Bencana yang sering datang melanda di sejumlah wilayah kabupaten Bojonegoro adalah banjir, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung dan kekeringan.

Banjir Kabupaten Bojonegoro tidak akan bisa lepas dengan kata banjir, hal itu dikarenakan kabupaten ini lewati sungai terbesar di Jawa Timur yaitu sungai bengawan solo. Dari melihat topografi kondisi Kabupaten Bojonegoro dialiri oleh Sungai Bengawan Solo mulai dari bagian Utara dan Selatan. Dari Sepanjang aliran sungai Bengawan Solo tepatnya wilayah utara adalah wilayah yang datarannya sangat rendah, maka dari itu di wilayah utara Bojoenegoro yang dialiri sugai bengawan solo mudah terkena luapan air. Tanah Longsor. (Puri, 2017)

Selain bencana banjir yang sering terjadi adalah bahaya tanah longsor yang diakibatkan karena kondisi tanah yang berbentuk lereng dengan tingkatan terjal yang terdapat pada kabupaten Bojonegoro

yang sedikit demi sedikit berkurang tingkat vegetasinya dikarenakan juga adanya illegal logging serta adanya luapan aliran dari anak sungai sehingga menjadi sungai dangkal. Tanah longsor yang di kabupaten Bojoengoro sering terjadi di bantaran dataran tinggi serta di dekat bantaran sungai yang dimana terdapat permukiman warga. (Yuniarta, 2015.)

Angin Kencang/ puting beliung Bencana angin kencang atau yang biasa dikenal dengan angin puting beliung terjadi ketika adanya pergantian musim di Kabupaten Bojonegoro. Angin tersebut berbahaya terutama pada daerah dengan wilayah hamaparan terbuka lebar seperti persawahan yang berpuluhaan hektar. Bencana ini juga selalu dirasakan dalam setiap tahunnya, tentu ini sangat membahayakan karena datangnya tidak bisa diprediksi dengan mudah pada saat kejadian itu berlangsung.

Kekeringan adalah bencana yang datang dari musim kemarau yang panjang sehingga menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan air bersih di daerah rawan kekeringan. Hal ini dapat menyebabkan juga gagalnya panen atau turunnya kualitas pertanian dikarenakan sulitnya para petani mengairi lahan mereka. Masyarakat ketika kemarau bisa sampai berkilo-kilo ke sumber yang masih dapat menghasilkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam musim kemarau hampir ada 28 kecamatan di

Kabupaten Bojonegoro yang mengalami bencana kekeringan, dan dapat meluas sampai musim penghujan tiba. (Machruf, 2020)

Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro

Menurut UU No 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, BPBD merupakan lembaga Pemerintah yang menjadi penggerak dalam penanggulangan bencana dengan kegiatan Pencegahan Bencana, Tanggap Darurat dan Rehabilitas. BPBD berada dibawah pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Lembaga Pemerintah. Dari 38 provinsi BPBD ditempatkan disetiap daerah untuk menanggulangi bencana daerah, salah satunya ditempatkan di Kabupaten Bojonegoro. BPBD merupakan lembaga struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. BPBD Kabupaten Bojonegoro dibentuk pada tahun 2009, dengan tugas utama menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana. Pembentukan BPBD Kabupaten Bojonegoro berlandaskan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro. BPBD memiliki tugas dalam menyusun dan melakukan kebijakan menanggulangi

bencana daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010, Pasal 4 BPBD memiliki tugas sebagai berikut : a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta relawan bencana d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana e. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (Isnaini, 2019.)

5. Kesimpulan

1. Berdasarkan indikator *Face to Face Dialog* (dialog tatap muka), kolaborasi dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Bojonegoro belum memenuhi indikator tersebut. Kolaborasi mitigasi bencana tanah

longsor hanya melibatkan beberapa anggota kolaborasi tertentu. Seperti Sektor Swasta (bisnis) dan Akademisi dalam dialog tatap muka sejauh ini belum terlibat. Terdapat MoU bentuk tertulis antara beberapa pihak dalam kolaborasi yang berbentuk Rencana Kontijensi tanah longsor, sebagai payung hukum.

2. Berdasarkan Indikator *Trust Building* (membangun kepercayaan) dalam kolaborasi ini sudah berjalan cukup terbangun. Hal ini dikarenakan hubungan antar pihak yang terlibat bersifat formal dan profesional, sehingga membuat antar *stakeholder* saling percaya karena tugas pokok dan fungsi masing-masing sudah jelas didasarkan pada bidang profesinya. Selain itu juga ditunjukkan dengan adanya keterbukaan satu sama lain selama proses kolaborasi.

3. *Commitmen to Process*

(komitmen terhadap proses) antar pemangku kepentingan dapat dikatakan cukup baik dan memenuhi indikator. Hal ini dapat dilihat dari *stakeholder* yang memiliki tujuan yang sama mengenai masalah mitigasi bencana tanah longsor. Dengan memahami hal tersebut, mendorong *stakeholder* lain untuk berupaya dan berusaha menjalankan program dan berkomitmen untuk mencapai tujuan kolaborasi. Keterbatasan penelitian ini yaitu Penelitian ini belum dapat mengungkapkan secara menyeluruh tentang pelaksanaan kolaborasi dalam mitigasi bencana tanah

longsor di Kabupaten Bojonegoro, karena mengingat belum adanya kejelasan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti dan kondisi yang terjadi di lapangan dalam proses pemetaan *stakeholder* yang terlibat, sehingga ada beberapa informan yang belum dapat peneliti gali informasi dan datanya secara lengkap yaitu dari pihak BPBD Kabupaten Bojonegoro. Peneliti juga kesulitan mendapatkan informasi dan data yang lengkap dari beberapa informan, seperti dari Dinas PU SDA hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dalam pencarian informan untuk di wawancarai, dan dari informan lain dikarena informan tersebut tidak ingin menjadi narasumber untuk wawancara, sehingga peneliti harus mencari kembali informan yang benar-benar ingin memberikan waktunya untuk proses wawancara.

6. Saran (optional)

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro sebagai koordinator utama penanggulangan bencana diharapkan lebih melibatkan kontribusi di dalam dialog tatap muka dengan semua unsur terlibat dari tingkatan paling atas sampai pada masyarakat sekalipun. Selain itu untuk tetap melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan peran swasta, akademisi, media massa, masyarakat untuk

memperkuat komitmen, dan meningkatkan koordinasi antar *stakeholders*.

2. Pimpinan Kecamatan Temayang agar selalu melakukan pengawasan serta pemantauan terkait penerapan program kolaborasi mitigasi bencana tanah longsor di desa karena dalam setiap kolaborasi Pimpinan Kecamatanlah yang keberadaanya cukup dekat dengan masyarakat.

3. Akademisi harus lebih aktif serta lebih berkontribusi dalam keterlibatan kegiatan kebencanaan seperti melakukan penelitian serta melakukan pemahaman, dan melakukan pendidikan terhadap masyarakat akan bahaya menebang pohon sembarangan.

4. Sektor Swasta untuk melakukan program-program CSR tidak hanya membantu pada saat terjadinya bencana dengan memberikan bantuan obat-obatan dan makanan tapi program CSR juga ditujukan untuk membantu sektor ekonomi masyarakat, hal ini perlu dilakukan karena salah satu faktor terjadinya tanah longsor dikarenakan masyarakat yang masih menebang pohon sembarangan karena faktor ekonomi.

5. Media Massa untuk tetap konsisten dan mempertahankan hasil yang selama ini sudah baik dalam perihal pengelolaan dan publikasian berita.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat harus lebih aktif dalam melakukan kolaborasi terkhusus dalam mitigasi bencana tanah longsor dengan melakukan perbaikan

lingkungan contohnya penanaman pohon, serta pemberian bibit pohon untuk masyarakat.

7. Kepada masyarakat khususnya yang lingkungannya sering terdampak bencana tanah longsor untuk lebih *care* terhadap lingkungan sekitar, dan melakukan kegiatan-kegiatan penanaman pohon dan pembuatan terasering agar tidak menyebabkan tanah longsor.

7. Daftar Pustaka

Ansell. C. & Gash. A, *Collaborative governance in theory and practice*, Journal of public administration research and theory, 2008.

Arrozaaq. D. L. C, *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan*

Emerson Kirk. Tina Nabatchi & Stephen Balogh, *Integrative Framework for Collaborative Governance*, Journal of Administration Research and Theory, 2012.

Isnaini, R. Analisis Bencana Tanah Longsor di Wilayah Jawa Tengah. *Islamic Management and Empowerment Journal*. (2019).

Isnaini. R, *Analisis Bencana Tanah Longsor di Wilayah Jawa Tengah*, Islamic Management and Empowerment Journal, 2019.

Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo, Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). (2016).

Kementrian ESDM, *Faktor Utama Penyebab Tanah Longsor*, 2008.

Machruf, I. N., Hermawan, D., & Meutia, I. F. Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*. (2020).

Machruf. I. N. Hermawan. & Meutia. I. F, *Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance*, *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2020.

Puri D. P & Khaerani T. R, *Strategi Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Purworejo*, Journal of Public Policy and Management Review, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2017.

Undang-Undang, *Penanggulangan Bencana Nomor 24*, 2007.

Undang-Undang, *Pengertian Mitigasi Nomor 24*, 2007.

Yulianto. A & Mutiarin. D, *Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Desa Tangguh Bencana*, Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 APPTMA, 2018.

Yuniarta. H. Saido & Purwana Y. M,
*Kerawanan bencana tanah longsor
Kabupaten Ponorogo. Matriks Teknik
Sipil, 2015.*